

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan berbagai instruksi (konsep atau ide) yang telah diterapkan dalam dokumen kebijakan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan serangkaian tindakan menerapkan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh individu atau organisasi khusus di bidang pendidikan.¹ Aspek-aspek yang perlu diperlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan pendidikan antara lain:

a. Idialized Policy

¹ Ach. Baidowi, *Implementasi Kebijakan Pendidikan*, (Banyumas: CV. Amara Media, 2021), hal.33.

Merupakan pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang organisasi untuk melaksanakannya. Jadi, perumus kebijakan harus dapat merencanakan pola kerja dan pola perilaku implementasi kebijakan yang akan diterapkan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang para pelaksana dan sasaran kebijakan untuk melaksanakan dan menerapkan kebijakan dengan baik.

b. Target Group

Merupakan kebijakan yang dibuat untuk diaplikasikan dalam suatu kelompok atau organisasi tertentu. Jadi semua anggota dalam organisasi diharapkan dapat menyesuaikan perilaku mereka dengan konsep kebijakan yang telah dirumuskan. Antara perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dapat merencanakan dan menerapkan tindakan sesuai dengan program kebijakan dalam organisasi.

c. Implementing Organization

Merupakan badan organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang ikut mempengaruhi implementasi kebijakan seperti budaya organisasi, realitas sosial, stabilitas ekonomi, dan politik. Setiap organisasi memiliki karakteristik tersendiri termasuk organisasi dibidang pendidikan, organisasi pendidikan sebagai sasaran utama kebijakan pendidikan bersama dengan unsur-unsur yang terdapat

didalamnya, diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat oleh Kementrian Pendidikan atau oleh dinas-dinas pendidikan lain sehingga apayang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan sangat baik.²

Menurut Rusdian aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan mencakup empat aspek, yaitu:

- a. Personel, merupakan orang atau sekelompok orang yang terlibat dan bertanggungjawab secara langsung terhadap proses pengimplementasian kebijakan dalam organisasi. Personel tersebut adalah pemimpin dan bawahan dipercayai untuk menyelesaikan pekerjaan mengimplementasikan program kebijakan yang ditugaskan dalam organisasinya. Dalam hal ini personel harus dapat bekerjasama dengan baik dengan cara alur komunikasi antara masing-masing personel, pembagian tugas yang relevan dengan kompetensi personel, serta pemberian kewenangan yang tepat kepada personel.
- b. Esensi Proses Administrasi, merupakan suatu kebijakan dalam proses implementasinya dilakukan melalui proses administrasi yaitu suatu proses menulis dan merekam kegiatan implementasi kebijakan dalam bentuk dokumen tertulis implementasi kebijakan yang dilakukan oleh anggota organisasi.

²Ibid., hal.34-35.

- c. Kepatuhan Kepada Kebijakan, merupakan aspek mematuhi dan menaati segala aturan dan interuksi yang terdapat dalam dokumen kebijakan selama proses implementasi kebijakan. Hal tersebut dilakukan agar kebijakan yang akan diimplementasikan tepat prosesnya dan jelas hasilnya. Tepat prosesnya, artinya kebijakan tersebut dalam proses implementasinya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dokumen kebijakan. Sedangkan jelas hasilnya, bahwa kebijakan yang telah diimplementasikan dengan prosedur atau proses yang tepat, maka hasil pada masing-masing tahapan dalam proses implementasi kebijakan diharapkan juga tepat dan jelas.
- d. Pengaruh dan Dampak Kebijakan, kebijakan yang telah dirumuskan harus dapat mempengaruhi dan memberikan dampak yang positif terhadap individu atau organisasi selaku sasaran kebijakan. Aspek mempengaruhi dapat dikatakan bahwa kebijakan yang akan diimplementasikan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam mengikuti segala aturan yang terdapat dalam dokumen kebijakan. Sedangkan aspek dampak adalah efek (positif atau negatif) yang dihasilkan dan diimplementasikannya suatu kebijakan pada individu atau kelompok sasaran kebijakan.³

³ *Ibid.*,hal.35-36.

2. Tahap Implementasi Kebijakan Charles O. Jones

Implementasi kebijakan Jones menyebutkan terdapat tiga kegiatan dalam implementasi kebijakan, yaitu: *Organization*, *Interpretasi dan Aplikasi*. *Organization* merupakan upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya merealisasikan kebijakan menjadi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. *Interpretasi* merupakan aktivitas interpretasi substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami. Aplikasi merupakan aktivitas penyedia layanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Tahapan implementasi kebijakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Interpretasi adalah aktivitas menjelaskan sesuatu ide atau konsep yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan supaya ide atau konsep tersebut mudah dipahami oleh orang lain atau orang yang bersangkutan. Dalam pengertian tersebut, bahwa interpretasi kebijakan dapat dijelaskan sebagai upaya menjelaskan dan menjabarkan konsep kebijakan yang masih bersifat umum menjadi konsep kebijakan yang lebih operasional yaitu suatu konsep kebijakan yang didalamnya berisi tentang prosedur-prosedur dan kriteria-kriteria kebijakan agar mudah

dipahami dan ditaati oleh seluruh pelaksana dan sasaran kebijakan dalam dalam proses pengimplementasian kebijakan.⁴

b. Tahap Pengorganisasian (*To Organoized*)

Linebery menjelaskan bahwa tahap pengorganisasian berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam serta diantara dinas-dinas dan badan ,pelaksana. Dalam hal ini pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan mengelompokkan dan membagi beberapa tindakan ke dalam berbagai jenis atau tindakan dengan tujuan menertibkan dan menata kinerja anggota supaya lebih tertata rapi dan terorganisir

Rifa'I dan Fadhli menejelaskan langkah-langkah proses pengorganoisian sebagai berikut:

- 1) Penentuan tujuan, seorang pemimpin harus mengetahui tujuan yang ingin dicapai organisasi. Tujuan tersebut merupakan pekerjaan atau tugas yang menjadi sasaran organisasi yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.
- 2) Penentuan kegiatan, seorang pemimpin harus dapat menyusun daftar kegiatan atau tugas yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai sasaran organisasi.

⁴ *Ibid.*,hal.47-48

- 3) Pengelompokan kegiatan, seorang pemimpin melakukan pengelompokan tugas atau kegiatan yang ada ke dalam beberapa kelompok tugas seperti yang diinginkan organisasi.
- 4) Pendelegasian wewenang, kegiatan pemberian wewenang kepada setiap unit atau bidang kerja yang telah dikelompokkan dalam organisasi.
- 5) Rentang kendali, penetapan jumlah personel yang terlibat dalam setiap bidang kerja yang telah ditentukan oleh organisasi.
- 6) Merinci tugas, kegiatan penetapan tugas kerja yang harus dikerjakan oleh masing-masing orang dalam bidang atau unit kerja organisasi.
- 7) Penetapan tipe organisasi, kegiatan menetapkan tipe organisasi yang akan dipakai misalnya tipe lini. Staf, lini dan staf, dan lainnya.
- 8) Penetapan bagan organisasi. Menetapkan bagan atau struktur birokrasi organisasi sebagai pedoman untuk menjalankan tugas dalam organisasi.

Dalam menghasilkan pengorganisasian implementasi kebijakan yang baik, organisasi harus menggunakan sistem desentralisasi kerja organisasi, yaitu suatu sistem kerja yang melibatkan karyawan atau bawahan untuk ikut serta dalam pembentukan pembagian kelompok kerja.⁵

⁵ *Ibid.*, hal.56-52.

c. Tahap Aplikasi (Application)

Tahap aplikasi merupakan tahap kegiatan yang melaksanakan dan menyediakan layanan oleh pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara rutin sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian lain tahap aplikasi merupakan tahap kebijakan implementor dan sasaran kebijakan melalui berbagai tindakan yang telah direncanakan oleh penanggungjawab pelaksana kebijakan. Aplikasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya peralatan dalam organisasi untuk mendukung aktivitas implementasi kebijakan yang akan dilakukan.

Menurut Widodo terdapat beberapa komponen penting yang mempengaruhi aplikasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Kebijakan, orang atau sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang diberi mandat dan bertanggungjawab untuk menjalankan kebijakan dalam organisasi. Dapat dikatakan sebagai pelaku proses pengaplikasian kebijakan, yang didalamnya terdapat beberapa orang atau sekelompok orang yang bertanggungjawab atas proses pengaplikasian kebijakan.
- 2) Standart Prosedur Operasi, dokumen tertulis yang berisi interuksi pengaplikasian kebijakan yang harus dikerjakan oleh aplikator kebijakan.

- 3) Sumber daya keuangan dan peralatan, sumber daya keuangan merupakan anggaran keuangan yang harus disiapkan oleh suatu kelompok organisasi untuk kepentingan proses aplikasi kebijakan. Sedangkan sumber daya peralatan adalah segenap peralatan yang diperlukan dan digunakan oleh aplikator untuk mendukung proses aplikasi kebijakan.
- 4) Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan, penetapan sistem koordinasi kerja yang berbentuk struktur atau bagan kerja sebagai alat untuk menyalurkan wewenang dari pemimpin kepada para *stakeholder* dan anggota organisasi lainnya.
- 5) Penetapan jadwal kegiatan, jadwal kegiatan pelaksanaan kebijakan menjadi penting karena tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standart untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan.⁶

3. Pendidikan Inklusif

a. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani "*paedagogie*" yang akar katanya "*pais*" yang berarti anak dan "*again*" yang artinya membimbing. Jadi "*paedagogie*" memiliki arti bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian dalam bahasa Inggris,

⁶ *Ibid.*, hal.63-70.

pendidikan diterjemahkan menjadi “*education*”. “*Education*” berasal dari bahasa Yunani “*educare*” yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Sehingga dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada anak.⁷

Pendidikan inklusif adalah *a meansto an end* atau cara untuk mencapai tujuan akhir. Jadi pendidikan inklusif bukan suatu kondisi statis dimana suatu sekolah akan siap melayani semua anak dengan perbedaan jika sumber daya yang ada disediakan. D’Allesio menuturkan pendidikan inklusif bukan merupakan *one off program* dimana Intervensi hanya dilakukan satu kali, misalnya dalam bentuk alokasi dana atau pelatihan guru. Kondisi ideal adalah semua anak dengan segala perbedaanya bisa berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran sehingga mampu menarik manfaat yang optimal pada masa sekolah. Kondisi ideal tersebut memerlukan perjuangan yang panjang dan terus menerus. Semua dapat disebabkan karena dalam akses pendidikan inklusif tidak terbatas pada akses untuk mendapatkan tempat dikelas, tetapi juga mendapatkan akses terhadap kurikulum dan pemebelajaran. Dengan demikian pendidikan inklusif tidak hanya terbatas untuk

⁷ Syafril dan Zelhendri Zen, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan cet ke 1, (Jakarta : Kencana, 2017), hal.27.

menjawab agenda “pendidikan untuk semua” tetapi lebih pada agenda “pendidikan berkualitas untuk semua”.⁸

Stubbs menegaskan pendidikan inklusif merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan pendidikan universal guna menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual anak dan masyarakat dan mensyaratkan ABK belajar di sekolah-sekolah terdekat dikelas biasa bersama anak-anak seusianya.⁹

Staub dan Peck menyatakan, bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh dikelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.

O’Neil menyatakan, bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, dikelas reguler bersama-sama teman sebayanya. Jadi melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selain itu anak berkelainan khusus (ABK) bisa terlihat atau tidak diabaikan.¹⁰

⁸ Munawir Yusuf dkk, *Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak* cet pertama, (Solo: Tiga Serangkai, 2018), hal.147.

⁹ Ni’matuzahroh dan Yuni Nurhamida, *Individu Berkebutuhan Khusus dan Pendidikan Inklusif* cet pertama, (Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), hal.43.

¹⁰ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif (Konsep dan Aplikasi)*” cet pertama, (Yogyakarta : Ar-Ruzza Media, 2013), hal. 26.

Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi Dakar paragraph 4 menyatakan bahwa *inclusive education to address the learning needs of all children, youth and adults with a specific focus on those who are vulnerable to marginalization an exclusion* . Pernyataan Salamanca tersebut memberikan gagasan tentang pentingnya membangun kesadaran kepada anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusif yang berupaya memperjuangkan hak-hak mereka agar tidak selalu termarginalkan dalam lingkungan mereka tinggal. Dengan adanya pengertian pendidikan inklusif tidak bermaksud memberikan pelabelan negatif kepada anak berkebutuhan khusus, akan tetapi lebih daripada itu sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik bagi mereka supaya bisa diterima di sekolah-sekolah umum atau pendidikan formal dan bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak sebayanya.¹¹

b. Tujuan Pendidikan Inklusif

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) No. 70 Tahun 2009 pasal 2 didalamnya memuat tujuan pendidikan inklusif yaitu sebagai wadah yang menaungi pendidikan bagi anak berkelainan ataupun berkebutuhan khusus dan anak yang memiliki kecerdasan istimewa diantaranya :

¹¹ *Ibid.*, hal.26-27.

- a. Menciptakan peluang terbuka bagi seluruh anak berkebutuhan khusus, baik dari kalangan memiliki cacat fisik, psikologis, mental maupun anak yang memiliki bakat istimewa agar mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan jenis dan kebutuhannya
- b. Meyelenggarakan layanan pendidikan yang adil dan menghargai perbedaan setiap individu anak didik.¹²

c. Filosofi Pendidikan Inklusif

Filosofi pendidikan inklusif mencerminkan faham tentang nilai-nilai filosofi yang termanifestasi dalam bingkai keberagaman dan kesetaraan antar sesama. Filosofi pendidikan inklusif berupaya memperjuangkan anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan akses yang lebih besar dan mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan pendidikan secara optimal. Sementara itu Vaughn, Bos, dan Sachumm, mengemukakan dalam praktik, pendidikan inklusif sebaiknya dipakai bergantian dengan istilah *mainstreaming*, yang secara teori diartikan sebagai penyediaan pelayanan pendidikan yang layak bagi anak berkelainan sesuai dengan kebutuhan individualnya. Kebutuhan individu dari anak berkebutuhan khusus merupakan elemen penting dalam memberdayakan hidup mereka agar tidak

¹² *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 70 Pasal 2 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Anak Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Keterbatasan, n.d.*

selalu terbelakang dalam kehidupan mereka. Sehingga hidupnya diakui dan tidak ada diskriminasi.

Konsep inklusif adalah sebuah filosofi pendidikan yang berkaitan langsung dengan relasi sosial antarsesama dalam upaya membangun kebersamaan tanpa memandang latar belakang kehidupan maupun status sosial. Mereka yang percaya konsep inklusif meyakini bahwa semua orang adalah bagian berharga dalam kebersamaan masyarakat, apapun perbedaan mereka. Perbedaan dalam kebersamaan sesungguhnya merupakan bagian dari kenyataan sejarah yang harus dihargai demi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam dunia pendidikan inklusif semua anak, terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, latar belakang sosial-ekonomi, suku, latar belakang budaya atau bahasa, agama atau gender, menyatu dalam komunitas sekolah yang sama. Semua perbedaan tersebut menyatu dalam satu kebersamaan dan ketentuan yang terbingkai dalam filosofi pendidikan untuk semua.

Pernyataan Salamanca bahwa kelas khusus, sekolah khusus, atau bentuk-bentuk lain pemisah anak penyandang cacat dari lingkungan regulernya hanya dilakukan jika hakikat atau tingkat kecacatannya sedemikian rupa sehingga pendidikan di kelas reguler dengan menggunakan alat-alat bantu khusus atau layanan khusus tidak dapat dicapai secara memuaskan. Satu paragraf dalam pasal 2

pernyataan Salamanca memberikan argumen yang sangat baik untuk sekolah inklusif: “Sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka, membangun suatu masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi sehingga menekan biaya untuk keseluruhan sistem pendidikan”.¹³

d. Landasan Pendidikan Inklusif

1. Landasan Filosofis

Secara filosofis pendidikan inklusif secara prinsip mengandung keadilan persamaan akan hak untuk mendapatkan layanan pendidikan disekolah-sekolah agar bisa belajar bersama-sama dengan teman seusianya. Penjelasan pendidikan inklusif secara filosofis sebagai berikut:

- a) Setiap anak memiliki hak mendasar yaitu pendidikan, termasuk anak berkebutuhan khusus.
- b) Setiap anak memiliki pribadi yang unik baik itu dari segi karakteristik, minat, dan kemampuan, serta kebutuhan dalam belajar dan berbeda.
- c) Pemerintah dan lingkungan sekitar anak mempunyai tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pendidikan.

¹³ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif (Konsep dan Aplikasi)* cet pertama, (Yogyakarta : Ar-Ruzza Media, 2013), hal. 81-85.

- d) Pendidikan layak diperoleh setiap anak.
- e) Pendidikan diharuskan membuka akses bagi setiap anak untuk mendapatkan hak belajar yang baik.¹⁴

2. Landasan Yuridis

- a) UUSPN No. 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1 dan 2
- b) UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1,2 dan 3
- c) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Pendidikan.
- d) UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1,2 dan 3
- e) Permen No. 70 Tahun 2009, Tentang Pendidikan Inklusif.¹⁵

3. Landasan Empiris

- a) Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948
- b) Konfeksi Hak Asasi Manusia Tahun 1989
- c) Konferensi Pendidikan untuk Semua Tahun 1990
- d) Pernyataan Salamanca di Tahun 1994 tentang pendidikan inklusif
- e) Komitmen Dakar di Tahun 2000 Mengenai pendidikan untuk semua
- f) Deklarasi Bandung Tahun 2004 dan Rekomendasi Bukit Tinggi Tahun 2005 “Komitmen Pendidikan Inklusif”.¹⁶

e. Manfaat Pendidikan Inklusif

¹⁴ *Ibid.*, hal. 18

¹⁵ *Ibid.*, hal 19

¹⁶ *Ibid.*, hal. 20.

1). Manfaat Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik berkebutuhan khusus memiliki rasa percaya diri dan memiliki kesempatan menyesuaikan serta memiliki kesiapan dari serta memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan yang nyata pada lingkungan umumnya. Peserta didik berkebutuhan khusus terhindar dari label atau sebutan yang tidak baik, memahami pelajaran disekolah dengan lebih baik dan mampu. Peserta didik berkebutuhan khusus akan lebih mandiri, dapat beradaptasi, aktif, dan dapat menghargai perbedaan, serta memperoleh kesempatan bersosialisasi dan berbagi dengan anak-anak pada umumnya secara alamiah sehingga akan memberikan masukan yang sangat berarti dalam aspek kehidupannya.¹⁷

2). Manfaat pendidikan inklusif bagi peserta didik pada umumnya

Peserta didik dapat belajar mengenai keterbatasan dan kelebihan tertentu pada teman-temannya, mengetahui keterbatasan dan kelebihan serta keunikan temannya. Peserta didik akan tumbuh rasa kepedulian terhadap keterbatasan dan kelebihan peserta didik berkebutuhan khusus. Peserta didik akan dapat mengembangkan keterampilan sosial, berempati terhadap permasalahan peserta didik

¹⁷ Dedy Kustawan, *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya* cet 2012, (Jakarta: PT Luxima Metro Media, 2012), hal.10.

yang berkebutuhan khusus dan teman-teman peserta didik pada umumnya yang mendapat kesulitan.¹⁸

3). Manfaat pendidikan inklusif bagi guru

Guru akan lebih tertantang untuk mengajar lebih baik dan dapat mengakomodasi semua peserta didik sehingga akan berupaya untuk meningkatkan wawasannya mengenai keberagaman karakteristik semua peserta didik. Guru akan lebih kreatif dan terampil mengajar dan mendidik, lebih mengenali peta kekuatan dan kelemahan peserta didiknya. Meningkatkan kompetensinya dalam bidang pendidikan khusus. Guru lebih terbuka terhadap perbedaan atau keberagaman peserta didik, mampu mendidik peserta didik yang lebih beragam, lebih terbiasa dan terlatih untuk mengatasi berbagai tantangan pembelajaran, sehingga guru dapat kepuasan dan pencapaian prestasi yang lebih tinggi.¹⁹

4). Manfaat Pendidikan Inklusif bagi Orang Tua

Orang tua akan merasa dihargai atau dapat meningkatkan penghargaan terhadap anak. Orang tua merasa senang ketika anaknya dapat bersosialisasi dengan baik tanpa ada diskriminasi dan akan lebih memahami cara memotivasi peningkatan belajar anaknya yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya. Orang tua akan lebih mengetahui cara membimbing anaknya dengan lebih baik, dapat meningkatkan interaksi dan keterlibatan dalam kegiatan

¹⁸ *Ibid.*, hal.11

¹⁹ *Ibid.*, hal.11

belajar anaknya serta mendapat kesempatan untuk sharing dengan pihak sekolah dan stakeholder lainnya dalam merencanakan pembelajaran untuk anaknya disesuaikan dengan kebutuhan khususnya, kekuatannya, kelemahannya, permasalahan dan hambatan lainnya.²⁰

5). Manfaat Pendidikan Inklusif bagi Sekolah

Pencitraan sekolah meningkat, sekolah lebih terbuka, ramah dan tidak mendiskriminasi. Sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif bagi semua peserta didik. Sekolah dapat meningkatkan akses bagi semua peserta didik untuk mendapat layanan pendidikan yang baik. Pendidikan tidak diskriminatif. Pembelajaran berpusat pada peserta didik (*student/child center*). Kegiatan pembelajaran dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Perilaku guru dapat membuat peserta didik senang belajar. Lingkungan dan sekolah ramah terhadap peserta didik.²¹

4. Anak Berkebutuhan Khusus

a. Definisi Anak Berkebutuhan Khusus

²⁰ *Ibid.*, hal.12

²¹ Dedy Kustawan, *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya* cet 2012, (Jakarta: PT Luxima Metro Media, 2012), hal.10-13.

Allah Swt menjadikan anak sebagai karunia dan hibah untuk menyejukkan pandangan mata, kebanggan orang tua dan sekaligus perhiasan dunia, serta menjadi belahan jiwa yang berjalan di muka bumi.

Allah swt berfirman:

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Q.S. Al Kahfi:46)

Dari sedikit pembahsan diatas, sebagai orang tua tidak perlu risau tentang nasib anak berkebutuhan khusus. Karena mereka memiliki potensi yang berbeda dari anak lainnya.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaan. Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terlambat dalam mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang tuli, buta, gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, gangguan emosional, juga anak-anak berbakat dengan intelegensi tinggi termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus karena mereka memerlukan penanganan dari tenaga profesional terlatih. Secara lebih anak berkebutuhan khusus lebih menonjolkan karakteristik fisik, intelektual

dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya atau diluar standar normal yang berlaku dimasyarakat.²²

b. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut IDEA atau *Individuals with Disabilities Education Act Amendments* yang dibentuk pada tahun 1997 dan ditinjau kembali pada tahun 2004 secara umum klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus sebagai berikut:

1) Anak dengan Gangguan Fisik

- a) Tunanetra, individu yang memiliki hambatan dan penglihatan.
- b) Tunarungu, individu seluruh sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang berkomunikasi dengan baik.
- c) Tunadaksa, individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan.

2) Anak dengan Gangguan Emosi dan Perilaku

- a) Tunalaras, individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.
- b) Tunawicara, anak yang mengalami kelainan suara, pengucapan, atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk.

²² Humairah wahidah, Sunardi, Abdul Salim, *Mengenal Lebih Dekat Anak Berkebutuhan Khusus Dan Pendidikan Inklusif*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018, hal.12.

- c) Hiperaktif, merupakan gangguan tingkah laku yang tidak normal, dikarenakan fungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian.
- 3) Anak dengan Gangguan Intelektual
- a) Tunagrahita, orang yang mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh dibawah rata-rata.
- b) Anak Lamban Belajar, anak yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita.
- c) Anak Berkesulitan Belajar Khusus, anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis dan berhitung.
- d) Anak Berbakat, anak yang memiliki bakat dan kecerdasan luar biasa yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan IQ diatas 135, kreativitas, dan tanggungjawab terhadap tugas diatas anak normal.
- e) Autisme, gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi verbal atau non verbal.²³

²³*Ibid*,hal 13-14.

5. Implementasi Pendidikan Inklusif

Pada tahun 1960 an merupakan awal proses menuju pendidikan inklusif di Indonesia oleh beberapa siswa tunanetra di Bandung. Dengan dorongan organisasi para orang tunanetra sebagai satu kelompok penekanan. Pada era tersebut SLB untuk orang penyandang tunanetra hanya memberikan layanan pendidikan sampai tingkat SLTP. Pada masa itu para pemuda penyandang tunanetra dibekali latihan kejujuran dalam bidang kerajinan tangan maupun pijat. Dengan keadaan yang kurang memungkinkan masuk ke jenjang SMA, para pemuda tunanetra tersebut bersikeras untuk mampu memperoleh tingkat pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi meskipun mendapatkan penolakan dari pihak SMA tersebut. Dan sejak saat itu sedikit demi sedikit terjadilah perubahan sikap masyarakat terhadap kecacatan dan beberapa sekolah umum mulai bersedia menerima siswa tunanetra.²⁴

Kemudian pada tahun 1970 akhir pemerintah memberikan empati dan menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan integritas dan pada saat itu juga mengundang Hellen Keller International, Inc. dalam rangka membantu mengembangkan sekolah integritas. Dengan adanya keberhasilan proyek tersebut, menghasilakn surat keputusan menteri pendidikan nomor 002/U/1986 yaitu tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat yang mengatur bahwa anak penyandang cacat yang memiliki kemampuan seyogyanya diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama

²⁴Endis Firdaus. “*Pendidikan Inklusif Dan Implementasinya Di Indonesia*”, Seminar Nasional Pendidikan, (2010).

dengan teman sebayanya. Namun sangat disayangkan, ketika proyek pendidikan integritas berakhir, implementasi pendidikan integritas semakin kurang dipraktikkan pada jenjang sekolah dasar. Namun, menjelang pada akhir tahun 1990 dilakukan lagi upaya baru untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui kerjasama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia dibawah oleh manajemen Braillo Norway dan direktorat PLB. Supaya tidak mengulangi kesalahan di masa lalu dengan program pendidikan integritas yang hampir mati pada saat itu.²⁵

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Pendidikan Inklusif bukanlah penelitian yang baru, akan tetapi perlu memperhatikan hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut tentang pendidikan inklusif. Berikut penulis menyajikan penelitian terdahulu:

1. Rima Reftiana Zulitasari, Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah 2018 dengan judul, “Implementasi Pendidikan Inklusif Di MI Darwata Karang Jati 01 Kec. Sampang Kab. Cilacap”. Skripsi Rima Reftiana Zulitasari mengkaji tentang bagaimana proses implementasi pendidikan inklusif di MI Darwata Karang Jati 01 Kec. Sampang Kab. Cilacap. Selain itu skripsi Reftiana Zulitasari membahas faktor pendukung dan dalam penerapan pendidikan inklusif, cara mengatasi hambatan dalam penerapan pendidikan inklusif di MI Darwata Karang Jati. Dalam pembahsan skripsi Rima Reftiana

²⁵ *Idib*, hal.7.

implementasi pendidikan inklusif hanya mengikutsertakan peserta didik yang berkebutuhan khusus disekolah reguler tanpa harus memenuhi hak-hak pendidikan yang sesuai dengan kondisi anak. Perbedaan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana pendidikan inklusif di SD Darwata Karangjati 01 Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian skripsi Reftiana Zulitasari tujuan pendidikan inklusif untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik dan menghargai keanekaragaman, kurikulum mengarah kepada mekanisme pengajaran dan modifikasi.²⁶

2. Ibnu Nasrulloh, skripsi Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 2016 dengan judul “Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Siswa Hiperaktif Di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta tahun 2016”. Skripsi Ibnu Nasrulloh mengkaji tentang tujuan mengetahui implementasi pendidikan inklusif pada siswa hiperaktif di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta. Serta penanganan pada siswa hiperaktif di SD Muhammadiyah Alam Surya Surakarta. Penelitian ini dilakukan atas dasar untuk mengingat bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan. Dari beberapa kebutuhan khusus siswa inklusif salah

²⁶ Rima Reftiana Zulitasari, Skripsi: *“Implementasi Pendidikan Inklusif Di SD Darwata Karangjati 01 Kec. Sampang Kab. Cilacap, (Cilacap: IAIN Purwokerto, 2018), hal. II*

satunya adalah siswa hiperaktif, siswa yang memiliki kemampuan bergerak lebih banyak dari pada siswa lain serta implusif.²⁷

3. Retno Asih, Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut Islam Nahdlatul Ulama, dengan judul “Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Kelas IV di SD Alam Lukulo Tahun Ajaran 2019/2020.” Penelitian skripsi tersebut dilakukan atas dasar adanya penyelenggaraan pembelajaran anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas dengan anaknormal pada kelas IV SD tersebut. Didalamnya membahas tentang proses pembelajaran dan kendala saat pembelajaran PAI dikelas IV serta sosialisasi yang dapat diambil guru PAI dalam mengatasi kendala tersebut yang ada dalam penelitian kualitatif. Perbedaan dari penulisan tersebut terletak pada masalah yang dibahas dan fokus penelitian.²⁸

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tahap interpretasi, tahap pengorganisasian dan tahap aplikasi implementasi pendidikan inklusif pada SD Negeri Pecarikan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

²⁷ Ibnu Nasrulloh, Skripsi: “*Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Siswa Hiperaktif Di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hal. V

²⁸ Retno Asih, Skripsi: “*Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Kelas IV di SD Alam Lukulo Tahun Pelajaran 2019/2020*, (Kebumen : IAINU Keumen, 2020), hal.x.